

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Latar Belakang Proyek

Anak adalah calon generasi muda bangsa yang sangat berharga yang nantinya akan berperan dalam perkembangan pembangunan masa mendatang. Agar pembangunan nasional dapat berjalan lancar maka harus dipersiapkan para generasi muda yang benar-benar berpotensi, oleh sebab itu pendidikan dan pembinaan untuk anak harus dilakukan secara maksimal. Akan tetapi tidak semua anak bisa mendapatkan pendidikan dan mendapatkan kehidupan yang layak. Hal inilah yang dialami oleh anak jalanan (anjol) yaitu anak laki-laki dan perempuan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja atau hidup di jalanan dan tempat-tempat umum, seperti pasar, mall, terminal bis, stasiun kreta api, taman kota dan persimpangan lampu merah. Anak jalanan terbagi menjadi dua kategori yaitu, Anak jalanan terlantar balita dibawah umur 5 tahun dan anak jalanan terlantar yaitu berumur diatas 5 tahun¹.

Di Kota Palembang saat ini, sebagian besar anak jalanan adalah remaja berusia belasan tahun. Tetapi tidak sedikit yang berusia dibawah sepuluh tahun. Anak jalanan bertahan hidup dengan melakukan aktifitas di sektor informal, seperti menyemir sepatu, menjual koran, mencuci kendaraan, menjadi pemulung barang-barang bekas. Sebagian lagi mengemis, menjual koran atau asongan, mengamen, dan bahkan ada yang mencuri, mencopet atau terlibat perdagangan seks.

Asosiasi Negara Asia Tenggara (ASEAN) memandang perlindungan sosial sebagai elemen kunci dalam kelangsungan kehidupan serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Itulah sebabnya, dalam konteks

¹ Menurut data pengelompokan jenis anak jalanan , Dinas Sosial Kota Palembang

strategi penanggulangan kemiskinan, penguatan sistem perlindungan sosial merupakan hal yang amat krusial².

Anak jalanan menjadi salah satu masalah yang kompleks dan bertalian dengan masalah sosial lain, terutama kemiskinan. Menangani anak jalanan tidaklah sederhana. Oleh sebab itu, penanganannya pun tidak dapat disederhanakan. Strategi intervensi maupun indikator keberhasilan penanganan anak jalanan dilakukan secara penyembuhan masalah sosial, mengacu kepada visi atau pembangunan kesejahteraan dengan memperhatikan karakteristik anak jalanan, fungsi dan model penanganan yang diterapkan³.

Keperdulian pemerintah terhadap anak jalanan terutama didasari kenyataan bahwa anak adalah asset bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal. Sementara itu, hidup di jalanan sangat membahayakan anak. Mereka kerap mengalami eksploitasi ekonomi oleh orang dewasa, termasuk oleh orang tuanya sendiri⁴. Dalam undang-undang dasar Negara Indonesia, terdapat pasal yang menangani masalah keberadaan anak jalanan, yaitu pasal 28B ayat 2 yang berbunyi ; “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif”. Anak jalanan berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial demi kesejahteraan anak jalanan tersebut. Dalam undang-undang dasar Negara Indonesia, terdapat pasal yang menyatakan bahwa negara ikut serta dalam memberi bantuan dan memberikan perlindungan terhadap anak jalanan, yaitu pasal 34 ayat 1 yang berbunyi ; “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.

² *Strengthening Social Protection Systems in ASEAN*, 2006:1 dalam Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, 2008

³ *Plan International*, 2007:1, 2006:1 dalam Suharto, Edi. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, 2008.

⁴ “Anak Jalanan Dalam Lingkaran Kekerasan ,” KOMPAS, 29 Agustus 2006

Pemerintah Kota Palembang menerapkan aturan ini dengan berpijak pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban. Perda ini kemudian diperkuat Surat Keputusan Walikota Palembang nomor 03 tahun 2003 yang ditetapkan pada 10 Januari 2003 lalu. Berarti sebetulnya sudah sembilan tahun perda ini dibuat, tepatnya di masa pemerintahan Walikota Palembang, Drs H Husni. Sanksi, yang diberikan adalah masa kurungan penjara selama 3 bulan atau denda. Tujuan sanksi sebenarnya semata-mata mengangkat harkat dan martabat anjal dan gepeng agar jangan minta-minta terus.

Anak jalanan di Sumatera Selatan pada bulan Januari 2010 mencapai 5.088 orang. Jumlah tersebut tersebar di 15 kabupaten dan kota. Di Palembang anak jalanan sendiri berjumlah 3.690 anak. Meningkatnya jumlah anak jalanan ini sebagai dampak pembangunan yang tidak berpihak dengan rakyat⁵. Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa di Palembang dibutuhkan *sebuah tempat yang dapat anak jalanan dengan baik dan layak huni, serta dapat memberikan pendidikan, pelatihan dan rehabilitasi, agar kesenjangan sosial akibat dampak dari kemiskinan pun tidak lagi mereka rasakan, sebagai aset bangsa yang akan menjadi penerus dari generasi muda Indonesia khususnya di kota Palembang*. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan perencanaan dan perancangan tentang **Panti Perlindungan Sosial Anak di Palembang**.

1.1.2. Latar Belakang Tema

Tema yang digunakan dalam perencanaan dan perancangan proyek ini adalah “Kebersamaan“, kata kebersamaan diambil dari salah satu sifat manusia mahluk sosial, yang tidak bisa hidup sendirian tanpa memerlukan orang lain. Hal itu pula yang menjadi ide pada konsep tema proyek panti perlindungan sosial anak ini, yaitu dengan menyediakan sebuah tempat dimana itu akan digunakan untuk bersama dan menjadi penghubung untuk massa-massa bangunan pada panti ini.

⁵ Taufik Wijaya - detikcom Palembang, Senin, 25 Januari 2010

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan landasan perencanaan dan perancangan ini adalah :

Bagaimana merencanakan dan merancang sebuah “Panti Perlindungan Sosial Anak di Palembang” yang memiliki fasilitas dan prasarana lengkap dan bisa menunjang dalam perlindungan, pendidikan, dan pelatihan anak jalanan, serta bisa mewujudkan sebuah panti yang berkonsep “kebersamaan” ?

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan dari perencanaan dan perancangan Panti Perlindungan Sosial Anak di Palembang, antara lain :

Mendesain Panti Perlindungan Sosial Anak di Palembang yang bertemakan “kebersamaan”, nyaman, serta memiliki nilai arsitektur.

1.3.2. Sasaran

Sasaran dari perancangan Panti Perlindungan Sosial Anak di Palembang ini antara lain :

1. Untuk merancang sebuah lingkungan binaan yang didalamnya menampung semua aktifitas dan kebutuhan anak jalanan.
2. Menciptakan karakter bangunan Panti Perlindungan Sosial Anak di Palembang
3. Memberikan penampungan dan binaan bagi anak jalanan
4. Serta mewujudkan sebuah kawasan yang memiliki konsep “kebersamaan”.

1.4. Lingkup Pembahasan

Penyusunan konsep dasar perencanaan dan perancangan bangunan Panti Perlindungan Sosial Anak di Palembang dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat berpengaruh pada perancangan proyek tersebut, nantinya dengan lebih menekankan pada konsep “kebersamaan”. Lingkup pembahasan menitikberatkan pada berbagai hal yang berkaitan dengan Panti Perlindungan

Sosial Anak di Palembang ditinjau dari disiplin ilmu arsitektur. Hal-hal diluar ilmu arsitektur akan dibahas seperlunya sepanjang masih berkaitan dan mendukung masalah utama.

1.5. Metode Pembahasan

1.5.1. Metode Kepustakaan

Studi literatur dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur, materi kuliah, maupun mengakses internet tentang masalah yang akan dibahas.

1.5.2. Metode Observasi

Sebelum melakukan perancangan Panti Perlindungan Sosial Anak di Palembang, penulis akan melakukan pengamatan terhadap anak jalanan, dan dari DEPSOS Kota Palembang untuk mencari data-data yang dibutuhkan serta dipelajari sebagai data awal untuk proses perancangan Panti Perlindungan Sosial Anak di Palembang agar menjadi suatu panti perlindungan sosial anak yang baik.

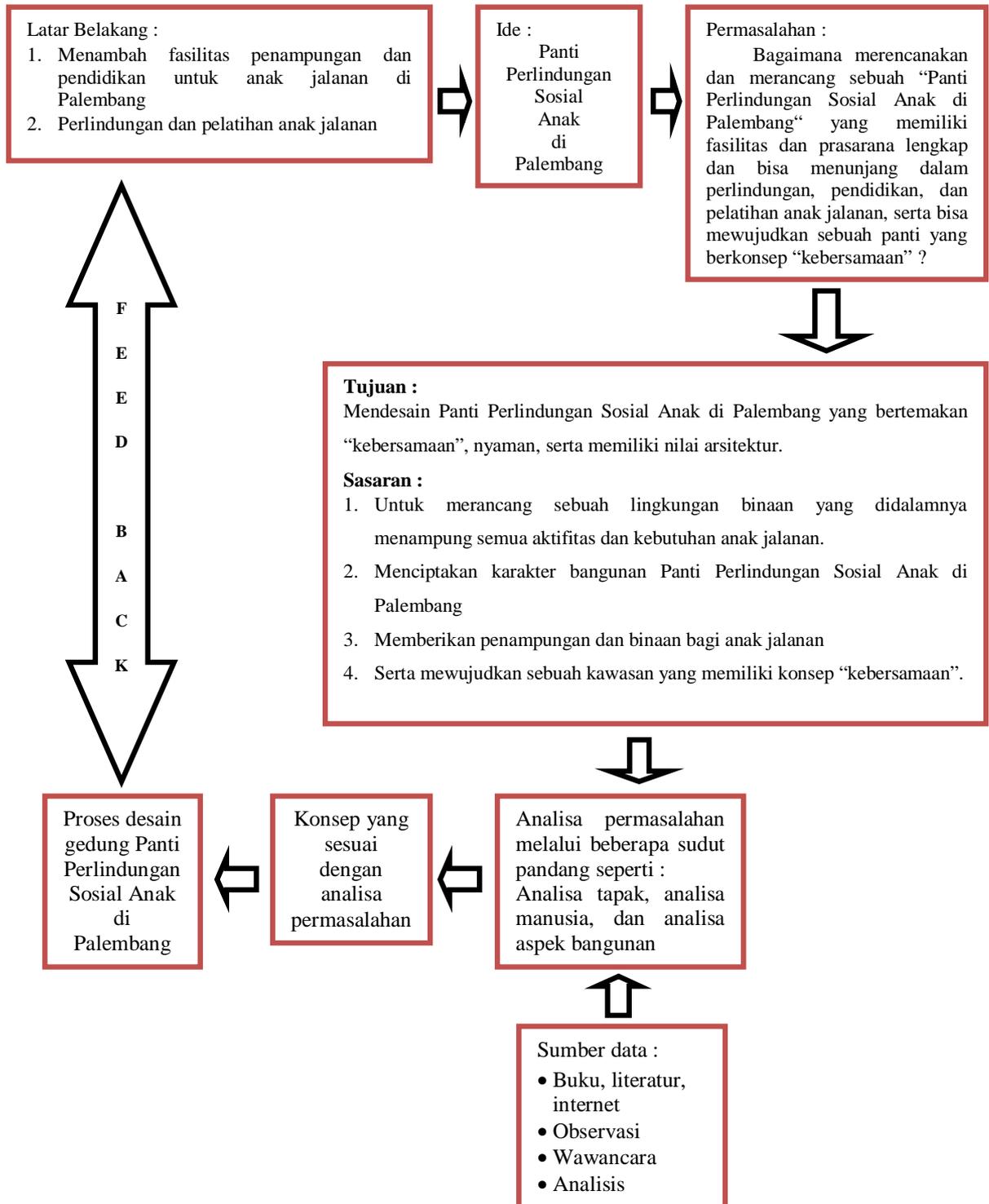
1.5.3. Metode Wawancara

Untuk mendapatkan berbagai informasi tentang anak jalanan, maka penulis akan melakukan wawancara terhadap beberapa anak jalanan dan Kepala Dinas Sosial di Kota Palembang untuk menambah data dan informasi bagi desain yang akan dibuat.

1.5.4. Metode Analisis

Pembahasan dilakukan dengan metode analisis deduktif yaitu menganalisa permasalahan dari yang bersifat umum tentang fasilitas Panti Perlindungan Sosial Anak di Palembang menuju ke masalah khusus yaitu tentang pemanfaatan dan penerapan konsep ‘kebersamaan’ sebagai faktor penentu perancangan.

1.6. Skema Alur Pikir



Skema 1.1

Skema alur pemikiran Panti Perlindungan Sosial Anak di Palembang
Sumber : analisa pribadi

1.7. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari laporan tugas akhir ini akan disusun dalam lima bagian dengan urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang proyek, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, batasan permasalahan, metode pembahasan dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM PROYEK

Bab ini berisi tentang hal-hal umum pada proyek ini, dengan mengambil data-data umum yang berhubungan dengan proyek ini melalui buku, majalah/koran ataupun internet.

BAB III TINJAUAN PANTI PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK DI PALEMBANG

Bab ini berisi tinjauan Kota Palembang secara umum dan rencana perencanaan dan perancangan Panti Perlindungan Sosial Anak di Palembang.

BAB IV ANALISA PANTI PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK DI PALEMBANG

Menguraikan tentang analisa manusia, analisa tapak, dan analisa aspek bangunan. Analisa tapak terdiri dari analisa lingkungan seperti matahari, *view*, angin, vegetasi, dan lain-lain. Analisa manusia terdiri dari analisa perilaku, analisa kegiatan, pola sirkulasi, dan kebutuhan ruang dan analisa aspek bangunan terdiri dari bentuk massa bangunan, analisa sistem struktur, analisa sistem utilitas.

BAB V KONSEP PERANCANGAN

Menguraikan tentang analisa bangunan berupa konsep perancangan yang berisikan konsep bentuk bangunan, konsep tampilan bangunan, konsep massa bangunan, konsep struktur, serta konsep utilitas bangunan.